



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SOEDONO MADIUN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSWANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 809272

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.335.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80.5 m²/80.5 m² di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m²/101 m² di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. Tanah Seluas 855 m² di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m²/101 m² di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 473.000.000

1. MOTOR, HONDA HF125TR M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.55 MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-L 4X2 8AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.019.100.000

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.919.100.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.